

*Petunjuk Pelaksanaan*

**SINERGI PROGRAM KAWASAN RUMAH PANGAN  
LESTARI (KRPL)  
DAN SISTEM DELIVERY BENIH/BIBIT**

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN**

**2014**

ISBN: 978-602-9462-60-9

*Petunjuk Pelaksanaan*

**SINERGI PROGRAM KAWASAN  
RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL)  
DAN SISTEM DELIVERY BENIH/BIBIT**

**Penanggung Jawab**  
Kepala BBP2TP

**Penyusun :**  
Maesti Mardiharini  
Sudarmadi Purnomo  
Harmi Andrianyta

**Redaksi Pelaksana :**  
Agung Susakti

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN**

**2014**

# KATA PENGANTAR

Pengembangan Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (m-KRPL) adalah salah satu upaya pemerintah dalam percepatan kemandirian dan ketahanan pangan rumah tangga, melalui peningkatan diversifikasi pangan. Model ini telah dikembangkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) ke seluruh provinsi di Indonesia. Mulai tahun 2011 hingga akhir 2013 Balitbangtan telah membangun sekitar 1.450 unit m-KRPL, dan Badan Ketahanan Pangan (BKP) telah mereplikasi hingga 12.500 KRPL ke seluruh provinsi. Pada TA.2014 dan 2015, Balitbangtan tidak lagi membangun m-KRPL, namun turut mendampingi dan mensinergikan program-program sejenis dengan KRPL, serta memperkuat sistem delivery benih di setiap provinsi.

Besarnya manfaat yang telah dirasakan oleh masyarakat mendorong berbagai pihak mereplikasi m-KRPL, baik lembaga pemerintah atau kementerian terkait, Pemerintah Daerah, lembaga kemasyarakatan, lembaga pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan sebagainya. Sinergi program KRPL di setiap provinsi dilaksanakan oleh BPTP, dan dikoordinasi oleh Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP).

Agar pelaksanaan kegiatan KRPL oleh berbagai pihak didasari oleh pemahaman dan persepsi yang sama terhadap konsep dan tahapan pelaksanaan m-KRPL, maka perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak). Karena dinamika kegiatan dan kebijakan yang begitu cepat, maka Juklak 2013/2014 yang telah dibuat sebelumnya pada dipandang perlu dilakukan perbaikan dan melengkapi Juklak tersebut sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan KRPL TA.2015.

Dengan penyusunan Juklak ini saya berharap semua pihak mempunyai persepsi yang sama terhadap prinsip KRPL, dan ini dapat menjadi salah satu pendorong bagi upaya percepatan pengembangan dan kelestariannya ke depan.

Jakarta, Desember 2014

Kepala Balai Besar Pengkajian

Dr. Ir. Abdul Basit, MS

# DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR LAMPIRAN .....	vii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan dan Sasaran .....	3
1.3. Indikator Keberhasilan .....	3
1.4. Pengertian dan Batasan .....	4
II. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KRPL TA. 2015	5
2.1. Alokasi Anggaran dalam DIPA BPTP .....	5
2.2. Pendekatan Penumbuhan dan Pengembangan KRPL .....	5
2.3. Pilar Keberlanjutan KRPL .....	7
2.4. Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Implementasi KRPL .....	9
III. SINERGI PROGRAM DAN PENDAMPINGAN KRPL	11
3.1. Lingkup dan Rencana Kegiatan .....	11
3.2. Langkah Operasional .....	12
3.2.1. Prosedur Pendampingan .....	12
3.2.2. Sinergi Operasional dengan Badan Ketahanan Pangan .....	13
3.2.3. Sinergi Operasional dengan Program Pemerintah Daerah dan Mitra .....	15
IV. SISTEM DELIVERY BENIH DAN PENGUATAN KEBUN BENIH/BIBIT INDUK (KBI)	17
4.1. Sistem Delivery Benih .....	17
4.2. Langkah Operasional .....	18

V.	RENCANA INTEGRASI PENGEMBANGAN TAMAN AGRO INOVASI DAN AGRO INOVASI MART BALITBANGTAN	23
5.1.	Prinsip .....	23
5.2.	Fungsi .....	23
5.3.	Roadmap Kegiatan .....	25
VI.	PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	27
6.1.	Pemantauan ( <i>Monitoring</i> ) dan Evaluasi .....	27
6.2.	Pelaporan dan Sistem Informasi KRPL .....	28
VII.	PENUTUP .....	29
	DAFTAR PUSTAKA .....	30
	LAMPIRAN .....	31

# DAFTAR LAMPIRAN

---

	Halaman
1. Format laporan KRPL .....	31
2. Format Database KRPL .....	33
3. Format Evaluasi Kegiatan Responsif Gender.....	34
4. Contoh Kuesioner Kajian Aspek Ekonomi, Sosial dan Kelembagaan KRPL .....	38

# DAFTAR GAMBAR

---

	Halaman
1. Tujuh (7) pilar keberlanjutan KRPL.....	7
2. Peran masing-masing instansi dalam sinergi pengembangan KRPL .....	11
3. Proses Delivery Benih dari Balai Penelitian ke RPL .....	19
4. Massalisasi Benih Unggul Balitbangtan .....	22



# I. PENDAHULUAN

---

## 1.1. Latar Belakang

Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dilandasi oleh Undang-Undang Pangan No.10 Tahun 2012 Pasal 41a, yang menyebutkan bahwa “Penganekaragaman pangan merupakan upaya meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam dan yang berbasis potensi sumber daya lokal untuk memenuhi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman”. Dalam implementasinya, KRPL juga mendukung empat kunci sukses pembangunan pertanian di Indonesia, yaitu percepatan upaya diversifikasi pangan dan peningkatan ketahanan pangan nasional. KRPL diluncurkan pada awal tahun 2011, dan terus diupayakan untuk direplikasi ke seluruh kabupaten/kota.

Pada peluncuran (*Grand Launching*) KRPL di Desa Kayen, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, tanggal 14 Januari 2012, Presiden Republik Indonesia menyatakan bahwa Rumah Pangan Lestari perlu dikembangkan ke seluruh wilayah di Indonesia. Pengembangan ini utamanya untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga, danantisipasi pada saat harga pangan melonjak tinggi. Menindaklanjuti gerakan Presiden tersebut, maka Menteri Pertanian menugaskan kepada instansi terkait di jajaran Kementerian Pertanian agar KRPL dikembangkan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian mendapat mandat untuk mengembangkan Model KRPL (m-KRPL). Sementara itu, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) mulai TA. 2011 menerapkan antara 1-2 unit, atau 44 unit kawasan di seluruh provinsi. Lokasi pengembangan ini diperluas lagi hingga sampai dengan akhir TA. 2013 telah terbangun sekitar 1.450 unit m-KRPL yang tersebar di setiap kabupaten/kota. Sementara itu, pengembangan (replikasi) KRPL secara masif terus dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan (BKP).

Prinsip utama pengembangan KRPL adalah mendukung upaya: (1) Ketahanan dan kemandirian pangan keluarga, (2) Diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal, (3) Konservasi tanaman pangan untuk masa depan, (4) Peningkatan kesejahteraan

keluarga. Pengembangan KRPL ini diimplementasikan melalui pemanfaatan lahan pekarangan, dan/atau sumberdaya ruang yang dapat untuk memelihara tanaman, ternak maupun ikan, baik di perkotaan, perdesaan, maupun peri urban. Agar terus berkelanjutan, maka perlu didukung oleh pengembangan Kebun Bibit Desa (KBD) di lokasi KRPL dan Kebun Benih/Bibit Induk (KBI) di tingkat provinsi, yang dikelola dengan baik beserta sistem deliverynya sehingga mampu mensuplai kebutuhan bibit/benih setiap saat.

Menggunakan prinsip-prinsip di atas dan dipandu dengan apa yang dibudidayakan juga dikonsumsi sendiri oleh keluarga RPL, diharapkan mampu memperbaiki kualitas gizi mereka, diindikasikan oleh meningkatnya Pola Pangan Harapan (PPH), yang diikuti oleh menurunnya biaya belanja pangan rumah tangga dalam KRPL.

Berdasarkan pengalaman, dengan mengambil contoh kawasan terdiri dari 20 – 30 Kepala Keluarga (KK) sebagai komunitas yang melaksanakan program m-KRPL dan perempuan sebagai agen utamanya, mempercepat difusi m-KRPL menjadi KRPL. Ini sepadan dengan sangat pentingnya peran perempuan dalam KRPL. Ketersediaan dan akses yang mudah dan cepat, karena bahan pangan segar tersedia di sekitar rumah membantu mereka dalam menyediakan makanan sehat dan bergizi.

Terobosan lain dalam pengembangan KRPL secara masif melalui elemen-elemen pemangku kepentingan kunci (*key stakeholders*), baik di pusat maupun di daerah antara lain: pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan/desa, baik lembaga pemerintah atau kementerian terkait, lembaga kemasyarakatan, lembaga pendidikan, sampai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan sebagainya.

Pendampingan dan sinergi kegiatan KRPL tersebut di tingkat provinsi dilaksanakan oleh BPTP dan dikoordinasi oleh Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP), dimana sesuai komponen program KRPL telah dilakukan penyelarasan dengan BKP Pusat. Agar pelaksanaan kegiatan tersebut terarah dan terkoordinasi dengan baik, maka perlu Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), dan dengan dinamika kebijakan yang begitu cepat, maka juklak yang telah diterbitkan pada TA.2013, disempurnakan dan disesuaikan sebagai acuan kegiatan TA.2015.

## 1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penerbitan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) ini adalah untuk memberikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan pengembangan KRPL di seluruh Indonesia secara lestari.

Sasaran penerbitan Juklak adalah mengarahkan pelaksana kegiatan KRPL di tingkat pusat maupun daerah untuk mencapai tujuan pengembangan KRPL, yaitu: (a) Meningkatkan kemandirian keluarga dalam penyediaan bahan pangan lokal, beragam, dan bergizi seimbang; (b) Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan dan/atau sumberdaya ruang, baik di perkotaan maupun perdesaan untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura (buah, sayuran dan tanaman hias) dan tanaman obat keluarga (toga), ternak dan ikan, serta penanganan hasil segar dan pengolahannya dengan prinsip berkelanjutan; (c) Mengembangkan logistik sumber benih/bibit dalam melayani keajegan kebutuhan benih/bibit bagi pelaku KRPL; (d) meningkatkan konservasi tanaman pangan lokal untuk masa depan; (e) Mengembangkan kegiatan ekonomi produktif keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menciptakan lingkungan hijau yang bersih dan sehat secara mandiri.

## 1.3. Indikator Keberhasilan Pengembangan KRPL

Keberhasilan pengembangan KRPL dinilai dari indikator berikut :

- a. Meningkatnya jumlah KRPL.
- b. Meningkatnya jumlah rumah tangga yang mengadopsi prinsip-prinsip rumah pangan lestari (RPL).
- c. Meningkatnya jumlah dusun, desa, kecamatan yang mengadopsi prinsip RPL maupun KRPL.
- d. Tumbuh dan berkembangnya kelembagaan KBD yang dapat melayani kebutuhan benih/bibit bagi RPL-RPL.
- e. Tumbuhnya *local champion* sebagai pengelola KRPL
- f. Meningkatnya keragaman jenis dan jumlah tanaman pekarangan sebagai pangan lokal.
- g. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan keluarga yang ditunjukkan oleh meningkatnya skor PPH.
- h. Menurunnya belanja pengeluaran kebutuhan pangan harian

- rumah tangga.
- i. Meningkatnya pemanfaatan dan pemasaran produk oleh karena kelimpahan hasil KRPL.
  - j. Tumbuh dan berkembangnya dukungan *key stakeholders* (Pemda, swasta, LSM, dan sebagainya).

#### 1.4. Pengertian dan Batasan

- a. **Rumah Pangan Lestari:** keluarga atau rumahtangga pelaku yang tergabung dalam komunitas KRPL.
- b. **Penataan Pekarangan:** optimalisasi pekarangan dalam kerangka pemenuhan dan peningkatan penyediaan bahan pangan beragam dan bergizi bagi ketahanan pangan keluarga.
- c. **Pemilihan Komoditas,** ditentukan dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, diversifikasi pangan berbasis sumber pangan lokal, pelestarian sumber pangan lokal, serta kemungkinan pengembangannya secara komersial berbasis kawasan.
- d. **Diversifikasi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal:** adalah upaya peningkatan konsumsi aneka ragam pangan lokal dengan prinsip gizi seimbang yang aman dikonsumsi.
- e. **Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL):** kawasan setingkat desa/kelurahan/RW/RT yang dibangun berkelompok dari beberapa rumah-rumah pangan lestari (RPL-RPL) yang menerapkan prinsip-prinsip pemanfaatan pekarangan dan/atau sumberdaya ruang dengan baik, berbasis sumberdaya lokal dan ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga, serta meningkatkan pendapatan keluarga, baik melalui efisiensi penurunan biaya belanja keluarga maupun penjualan kelimpahan produk yang dihasilkannya dalam mencapai ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga atas dasar partisipasi aktif yang saling berintegrasi antar rumahtangga di dalam masyarakat.

## II. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KRPL TA.2015

---

### 2.1. Alokasi Anggaran dalam DIPA BPTP

Dalam rangka mendukung pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari secara masif, maka pendampingan KRPL di setiap provinsi dan kabupaten/kota masih perlu dilakukan oleh BPTP. Terkait kegiatan ini, maka dalam DIPA BPTP TA.2015 telah dianggarkan untuk: (1) Penguatan Kebun Bibit/Benih Inti (KBI) di setiap provinsi, yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan benih/bibit untuk penguatan KBD atau KBK di setiap kabupaten/kota; dan (2) Pendampingan KRPL yang dibangun oleh Badan Ketahanan Pangan dan mitra dalam rangka sinergi program.

Mengingat terbatasnya anggaran, dibandingkan dengan jumlah lokasi KRPL yang akan dibangun BKP pada TA.2015, maka kegiatan pendampingan tersebut berupa sosialisasi model atau konsep inovasi teknologi Badan Litbang Pertanian (m-KRPL), pelatihan dan pengawalan teknologi.

Pada DIPA BPTP Tahun Anggaran 2015 juga dianggarkan pengembangan Taman Agro Inovasi dan Agro Inovasi Mart Balitbangtan. Kegiatan ini akan diintegrasikan dengan kegiatan KRPL. Rencana Integrasi tersebut diuraikan pada Bab V.

### 2.2. Pendekatan Penumbuhan dan Pengembangan KRPL

Untuk menjamin keberlanjutan KRPL, pendekatan yang digunakan dalam penumbuhan dan pengembangan KRPL direncanakan akan melewati 4 tahapan. Keempat tahapan tersebut mulai dari penumbuhan model, replikasi, pengembangan usaha dan keberlanjutan usaha. Setiap tahapan pengembangan tersebut melibatkan berbagai pihak, dari mulai BPTP, Penyuluh, Dinas pertanian, Swasta, Kelompok (wanita) Tani, sampai dengan industri pengolahan. Kekuatan peran masing-masing pihak, berbeda setiap tahap pengembangan, seperti yang diuraikan dalam matriks berikut (Tabel 1).

Tabel 1. Keterlibatan para pihak terkait dalam tahap pengembangan KRPL

Tahapan Penumbuhan dan Pengembangan	Keterlibatan Para Pihak					
	BPTP	Penyuluh	BKP & Dinas Pertanian	Swasta/ pedagang	Rumah tangga dan Kelompok Pengelola KRPL	Industri Pengolahan
Penumbuhan Model KRPL (m-KRPL)	XXXX	XXXX	XX	X	XXXX	XX
Replikasi (Pengembangan KRPL)	XX	XXXX	XXXX	XXX	XXXX	XXX
Pengembangan Usaha	X	XX	XX	XXXX	XXXX	XXX
Keberlanjutan usaha	-	X	X	XXX	XXXX	XXXX

Keterangan: x menunjukkan tingkat keterlibatan, semakin banyak jumlah X diharapkan semakin besar tingkat keterlibatannya

Pada tahap pertama, diawali dengan penumbuhan model KRPL (m-KRPL) dan inisiasi awal replikasi. Pada tahapan ini peran BPTP dan kelompok petani sasaran yang dominan, dan peran BPTP lebih dominan dalam memperkuat kelompok pengelola KRPL daripada pendamping yang disiapkan oleh pemangku kepentingan di daerah. Bersamaan dengan pendampingan ini, BPTP juga mulai menginisiasi replikasi model dengan memberikan peran yang lebih dominan kepada penyuluh atau pendamping lapang dari Badan Ketahanan Pangan (BKP) yang ada di lokasi dan menjadikan BKP sebagai pusat pengembangannya.

Tahap kedua adalah replikasi (pengembangan model), yaitu penambahan jumlah dan perbaikan kinerja model berdasarkan pengalaman ketika penumbuhan m-KRPL. Tahapan ini memberikan peran lebih banyak kepada pendamping lapang dari BKP. Hal ini dimaksudkan agar terjadi percepatan kemandirian kelompok pengelola KRPL dengan menumbuhkan berbagai unit usaha, baik dalam bentuk usaha masing-masing RPL maupun berkelompok.

Tahap ketiga pengembangan usaha, adalah membangun kemitraan dengan unit usaha untuk menampung kelimpahan produk KRPL. Pada tahap ini juga pendamping lapang terus

memperkuat posisi kelompok, sehingga kelompok menjadi mandiri dan telah mampu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, terutama yang terkait dengan pedagang/pemasaran hasil dan pengolahan hasil. Pada tahap ini ini juga peran kelompok akan semakin dominan, dukungan yang semakin banyak dari pedagang dan industri pengolahan.

Tahap keempat adalah keberlanjutan usaha. Pada tahap ini pengembangan kegiatan benar-benar mengait erat dengan industri pengolahan, baik itu industri pada level rumah tangga atau industri kecil dan menengah. Bila hal ini telah terjadi, maka dapat dikatakan bahwa KRPL akan berubah menjadi sentra pengembangan komoditi spesifik lokasi yang berbasis pada pemanfaatan lahan pekarangan. Pada tahapan ini peran BPTP sudah tidak ada, sementara dinas dan penyuluh lebih pada peran fasilitasi dan dukungan kebijakan.

### 2.3. Pilar Keberlanjutan KRPL

Berhasil atau tidaknya suatu program pemberdayaan masyarakat, dapat dinilai dari keberlanjutan program tersebut. Dari hasil supervisi di berbagai lokasi m-KRPL, utamanya di Desa Kayen, Pacitan, Jawa Timur, dan Desa Mulyasari, Karawang, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, dan sebagainya, telah teridentifikasi adanya 7 (lima) pilar utama yang menjadi kunci keberlanjutan KRPL. Kelima pilar utama tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Tujuh (7) pilar keberlanjutan KRPL

Ketersediaan dan kesiapan infrastruktur dan potensi sumberdaya alam terutama terkait dengan ketersediaan air, media tanam dan sarana produksi (input) lainnya, sangat penting diperhatikan untuk pengembangan KRPL. Untuk itu, identifikasi awal di calon lokasi perlu dilakukan untuk menilai potensi dan masalah bagi pengembangan KRPL ke depan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah akses masyarakat terhadap infrastruktur tersebut.

Partisipasi masyarakat, terutama peran aktif tokoh masyarakat (*local champion*) atau kelembagaan pengelola KRPL juga perlu ditumbuhkan. Tokoh masyarakat, baik pamong desa, maupun ketua atau pengurus: kelompok tani atau kelompok keagamaan, yang dituakan atau “sesepuh” adat, penggerak PKK, Posyandu, dan sebagainya, semua dapat berfungsi sebagai penggerak atau motivator dalam pengembangan KRPL. Mereka berperan dalam menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kemandirian dan ketahanan pangan, perlunya gizi dan makanan yang sehat bagi keluarga, serta penghematan belanja/pengeluaran dan peningkatan pendapatan keluarga untuk peningkatan kesejahteraan mereka.

Ketersediaan benih ataupun bibit yang dibutuhkan masyarakat perlu diperhatikan dalam pengembangan KRPL. Untuk itu Kebun Bibit Desa atau Kelurahan (KBD/KBK) wajib dibangun atau ditumbuhkan dan dikelola dengan baik. Pengelolaan dan aturan mainnya diserahkan kepada kelompok. Petunjuk penumbuhan dan pengelolaan KBD/KBK tersebut telah dicetak secara terpisah dengan Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan KRPL ini.

Dukungan Pemerintah Daerah (Pemda), baik berupa kebijakan maupun alokasi anggaran atau bentuk natura, juga menjadi pilar keberlanjutan KRPL. Kebijakan Pemda, dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), tentang pentingnya pengembangan KRPL untuk ketahanan dan kemandirian pangan wilayah perlu diimplementasikan baik dalam bentuk gerakan, atau himbaskan kepada segenap jajarannya, baik di tingkat provinsi, kabupaten, hingga tingkat desa. Alokasi anggaran, baik dalam bentuk APBD Tingkat I maupun APBD Tingkat II, dukungan dalam bentuk natura seperti benih/bibit tanaman, ternak maupun ikan, serta



pendampingannya juga sangat diperlukan dalam pengembangan dan keberlanjutan KRPL.

Suatu program pemberdayaan masyarakat seperti pengembangan KRPL ini, dapat berhasil atau berkelanjutan apabila komoditas yang diusahakan dipilih secara tepat dan dapat dirasakan manfaatnya serta mempunyai nilai ekonomi bagi pelaksana maupun masyarakat sekitarnya. Dalam pengembangan KRPL, produk yang dihasilkan oleh setiap rumahtangga (RPL) berpeluang untuk dijual. Tentunya bila tujuan pertama (pemenuhan pangan dan gizikeluarga) telah terpenuhi. Pembentukan kawasan dalam pengembangan KRPL bertujuan agar produk yang dihasilkan oleh setiap RPL juga mempunyai nilai atau manfaat ekonomi. Produk yang dihasilkan dalam KRPL ini sangat khas, karena berupa komoditas segar dan sehat (organik), sehingga segmen pasarnya pun dapat dibedakan. Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Kelembagaan Pasar disusun secara terpisah.

Kelembagaan pendukung lainnya sebagai pilar keberhasilan pengembangan KRPL antara lain: kelembagaan input, kelembagaan pengolahan hasil, dan sebagainya. Kelembagaan tersebut otomatis akan tercipta apabila produk yang dihasilkan KRPL ini telah berkembang dan berkesinambungan (lestari).

#### **2.4. Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Implementasi KRPL**

Kementerian Pertanian telah berkomitmen mendukung implementasi Inpres No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), karena disadari bahwa terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender di bidang pertanian akan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja pertanian, mulai dari aparat hingga pelaku di bidang pertanian. PUG adalah salah satu strategi pembangunan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Konsep PUG harus melibatkan langsung perempuan dan laki-laki secara proporsional melalui partisipasi aktif dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pemantauan, serta evaluasi dalam semua bidang pembangunan.

Dukungan tersebut ditunjukkan melalui kegiatan yang responsif gender sejak awal dirintisnya PUG tahun 2000, terutama

melalui: (1) Proyek-proyek PHLN, seperti P4K dan FEATI (BPSDMP), ARMP/PATTP (Litbang Pertanian), PIDRA (BKP) dan proyek-proyek lainnya; (2) Pembentukan Tim Koordinasi PUG dan Kelompok Kerja PUG tingkat Kementerian Pertanian mulai Tahun 2003; (3) Sosialisasi konsep Gender dan PUG tingkat pusat dan daerah; (4) Pelatihan TOT PUG dan Penyusunan/ pelaksanaan Desa Model PUG Gender; dan (5) Telah menerbitkan berbagai panduan yang terkait dengan konsep gender dan PUG serta panduan umum Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Mulai TA. 2013, bentuk dukungan Kementerian Pertanian dalam PUG tersebut memasukkan kegiatan KRPL, mulai dari perencanaan, penganggaran, implementasi, monitoring sampai evaluasi, disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 119/2009 dan No.104/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga untuk pelaksanaan anggaran di Tahun 2011. Untuk itu, data dan informasi implementasi KRPL yang responsif gender di setiap lokasi juga harus disampaikan ke Biro Perencanaan Kementerian Pertanian, yang selanjutnya dilaporkan ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Jenis data dan informasi tersebut di setiap lokasi direkap dalam bentuk matriks seperti dalam **Lampiran 2**.

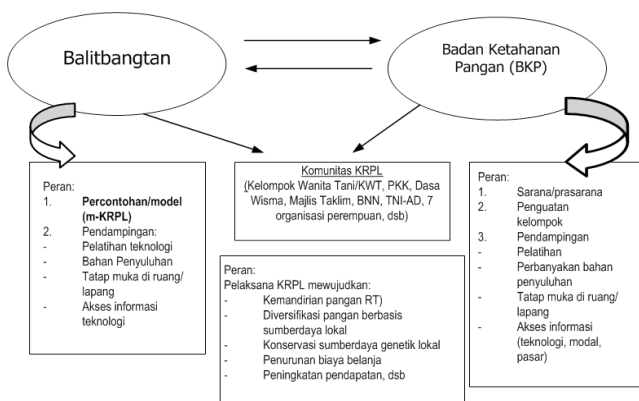
Oleh karena banyak organisasi perempuan di tingkat desa dan kota, antara lain PKK, Dasa Wisma, pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Posyandu, Majlis Taklim, dan sebagainya, maka sasaran sosialisasi dan pelatihan tentang KRPL kepada *local champion*, tidak hanya ditujukan kepada laki-laki namun juga kepada perempuan. Unit-unit usaha dibawahnya dapat saja dilakukan oleh kelompok tani atau kelompok-kelompok yang lain dari dalam desa/kota.

### III. SINERGI PROGRAM DAN PENDAMPINGAN KRPL

#### 3.1. Lingkup dan Rencana Kegiatan

Perkembangan implementasi KRPL di setiap provinsi sampai dengan tahun 2014 menunjukkan peningkatan, baik secara kuantitas yang direfleksikan dengan peningkatan jumlah KRPL termasuk RPL, maupun peningkatan kualitas konsumsi masyarakat yang ditunjukkan dengan peningkatan skor PPH dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan penghematan biaya belanja rumah tangga. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi m-KRPL tahun 2013, terjadi peningkatan rataan PPH sebesar 6,7 poin di 18 prosinsi, dengan kisaran rataan 62,7 – 86,9; dan penghematan biaya belanja rumahtangga dari penghitungan yang mencakup seluruh strata berkisar antara Rp 120.000,- - Rp 825.000,-per KK per bulan. Berangkat dari kinerja tersebut, maka implementasi KRPL di tahun 2015 didesain dengan replikasi KRPL oleh Badan Ketahanan Pangan (BKP) dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) atau mitra lainnya sementara BPTP bertugas melaksanakan pendampingan

Untuk itu, diperlukan sinergi program antara Balitbantan dengan BKP dan pemangku kepentingan lainnya (Gambar 2).



Gambar 2. Peran masing-masing instansi dalam sinergi pengembangan KRPL

Sinergi antar lembaga dilaksanakan berdasarkan program atau kegiatan masing-masing lembaga tersebut yang tujuan akhir (*goal*)nya sama, yaitu menuju Ketahanan Pangan. Sinergi tersebut dapat diuraikan seperti matriks di bawah ini.

Lembaga	Program/Kegiatan	Tujuan (Goal)
Balitbangtan	m-KRPL	<b>Kesejahteraan Keluarga dan Masyarakat</b>
Badan Ketahanan Pangan	Pengembangan RPL dalam kawasan P2KP Kampanye diversifikasi pangan dsb	
Mitra Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon (GPTP)</li> <li>• Pertanian Perkotaan)</li> <li>• Rumah Pintar</li> <li>• Desa Sejahtera</li> <li>• Rumah Hijau</li> </ul> dsb	

### 3.2. Langkah Operasional

#### 3.2.1. Prosedur Pendampingan

Pendampingan oleh BPTP dalam pengembangan KRPL meliputi:

1. **Pelatihan teknologi.** Peran BPTP adalah sebagai narasumber, baik dalam pertemuan di kelas (pemaparan konsep dan penerapan KRPL) maupun praktek di lapang, atau kunjungan (*field trip*) ke lokasi m-krpl yang telah berhasil dan lestari
2. **Penyiapan bahan/materi penyuluhan,** dapat berupa barang cetakan (buku petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis, leaflet, dsb), maupun berupa bahan tayang (CD/DVD, dsb).
3. **Tatap muka di ruang/lapang,** berupa konsultasi atau advokasi.

4. **Akses informasi teknologi**, yaitu memberikan informasi mitra tentang jenis teknologi tepat guna atau spesifik lokasi, cara penggunaannya, bagaimana mendapatkan (mengakses)nya, dan sebagainya

Pendampingan BPTP tersebut dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Membentuk Tim Pendampingan KRPL di tingkat BPTP; yang bertugas:
  - Menyusun petunjuk teknis
  - Melakukan koordinasi di tingkat pusat dan daerah
  - Mengawal implementasi KRPL
  - Monitoring dan evaluasi
  - Melaporkan hasil kegiatan
- b. Menyelenggarakan *Training of Trainers* (TOT) di tingkat provinsi.
- c. Pengawasan dan pendampingan teknologi bagi terwujudnya aspek lestari dalam implementasi KRPL.
- d. Monitoring secara berkala yang juga digunakan sebagai ajang pertemuan untuk membangun komitmen pelaksana (RPL).
- e. Menjalinkan koordinasi yang komunikatif dengan instansi terkait.

### **3.2.2. Sinergi Operasional dengan Badan Ketahanan Pangan**

Sinergi Badan Litbang Pertanian dengan Badan Ketahanan Pangan (BKP) dalam rangka pengembangan KRPL dilaksanakan baik melalui sinergi program, lokasi, pelaksanaan, supervisi, maupun Posko KRPL. Secara operasional, berbagai sinergi tersebut diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Sinergi Program**

Program strategis dalam bidang pangan antara lain membangun logistik pangan yang kuat. Salah satu komponen logistik pangan adalah ketersediaan pangan cukup, akses mudah, dan pangan berkualitas. Ini akan kokoh dengan partisipasi aktif rumah tangga dan masyarakat, dan saat ini model percontohnya (m-KRPL) telah dibangun oleh Badan Litbang Pertanian di 33

provinsi, kemudian pada Tahun 2013 dan 2014 dikembangkan menjadi KRPL setiap tahun sekitar 5000 desa oleh BKP.

## 2. Sinergi Lokasi

Lokasi m-KRPL menjadi percontohan dalam mengembangkan KRPL, tentu fungsinya menjadi:

- a. Tempat pembelajaran bagi pelaksana dalam pengembangan KRPL.
- b. Tempat pelatihan dalam menerapkan inovasi teknologi untuk pengembangan KRPL.
- c. Tempat pelatihan dalam pengembangan komunitas KRPL.
- d. *Show window* KRPL-KRPL di daerah.
- e. Tempat kunjungan wisata dan kuliner dalam menerapkan pola pangan yang baik.

## 3. Sinergi Pelaksanaan

### ***Pelaksanaan di Pusat***

- a. Membangun sinergi dengan BKP pusat, dalam menyiapkan pedoman umum pelaksanaan pengembangan KRPL di daerah dan bahan ajar untuk pelaksanaan pelatihan atau *Training of Trainers* (ToT) KRPL, melalui pertemuan-pertemuan koordinasi.
- b. Melakukan koordinasi, sosialisasi, advokasi, supervisi, monitoring dan evaluasi bersama masing-masing unit kerja (UK) dan unit pelaksana teknis (UPT) di bawahnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing instansi UK/UPT tersebut.
- c. Menyiapkan berbagai bentuk diseminasi tentang KRPL

### ***Pelaksanaan di Daerah***

- a. Membangun sinergi dengan BKP provinsi maupun kabupaten/kota dalam menggerakkan Posko KRPL melalui pertemuan-pertemuan koordinasi.
- b. Melakukan sosialisasi, pendampingan, advokasi, dan supervisi bersama kepada masyarakat melalui KRPL sesuai dengan tupoksi masing-masing instansi.

c. Melakukan promosi, gelar dan gerakan tentang KRPL.

### **3.2.3. Sinergi Operasional dengan Program Pemerintah Daerah dan Lainnya**

SinergikementerianPertanianatauBalitbangtankhususnya, dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan KRPL dilaksanakan baik melalui sinergi program, lokasi, pelaksanaan, maupun supervisi, seperti yang telah diuraikan di atas (point 4.2.3). Dalam pengembangan sinergi tersebut, dukungan Pemerintah Daerah dapat berupa:

- a. Kebijakan terkait pengembangan KRPL, dapat berupa instruksi maupun gerakan
- b. Anggaran, baik melalui APBD Tk.I, APBD Tk.II, dan sebagainya

Natura, baik berupa hak pakai lahan untuk KBD; bantuan berbagai benih/bibit tanaman (pangan, buah, sayuran, dan toga), ikan, ternak, dan sebagainya.

Selain itu, penyuluh lapang dari dinas terkait perlu juga untuk diberdayakan dalam upaya mendampingi pelaksanaan di tingkat RPL. Untuk itu, perlu dibentuk Tim Pendamping di tingkat lapang, berdasarkan surat penugasan atau penunjukkan dari pejabat di dinas terkait. Hal ini penting, sebagai bentuk menjalin komitmen agar kunci lestari dapat diwujudkan.





## IV. SISTEM DELIVERY BENIH DAN PENGUATAN KEBUN BIBIT/ BENIH INDUK (KBI)

---

### 4.1. Sistem Delivery Benih

Delivery benih adalah suatu proses mengalirnya benih yang berasal dari suatu unit sumber benih sampai ke tangan anggota KRPL untuk selanjutnya dibudidayakan. Konsep ini seharusnya berjalan secara simultan dan kontinu sehingga pihak anggota KRPL tidak mengalami hambatan atau keterlambatan baik terhadap jenis tanaman, jumlah dan waktu yang dibutuhkan. Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan agar delivery benih tersebut berjalan simultan dan kontinu adalah sebagai berikut :

1. **Membuat perencanaan dan rotasi tanam** lingkup kawasan untuk satu tahun dengan kalender tanam. Kalender tanam memuat informasi jenis komoditas, jumlah RPL yang akan menanam dan waktu pertanaman.
2. **Memetakan jenis, jumlah dan waktu.** Kebutuhan benih oleh RPL dalam satu musim tanam dan satu tahun kalender tanam perlu mempertimbangkan kapasitas produksi KBD dan sumber daya pengelola. Hasil pemetaan kebutuhan benih berdasarkan jenis, jumlah dan waktu selanjutnya disampaikan sebagai rencana kebutuhan ke Badan Litbang Pertanian di masing-masing Propinsi (KBI di BPTP) untuk disinkronkan penyediaannya.
3. **Aspek komersial KBD.** Untuk menjamin terjadinya suplai dan demand benih tersebut dari pihak KBD ke anggota KRPL, perlu ikatan komersialisasi antara pihak KBD dengan anggota KRPL melalui sistem jual beli benih. Sehingga pihak KBD mendapat keuntungan dalam memproduksi benih yang dibutuhkan dan pihak anggota mendapatkan jaminan benih yang berkualitas sesuai jenis, jumlah dan waktu.
4. Perlu dipertimbangkan **nilai ekonomi** suatu komoditas, **preferensi konsumen** terhadap komoditas, dan **tingkat kesulitan budidaya** suatu varietas. Aspek-aspek tersebut akan berpengaruh terhadap jumlah permintaan terhadap suatu komoditas tertentu. Pengaruhnya bisa positif bisa

juga negatif.

5. **Tenaga pelaksana.** Tenaga pelaksana di KBD maupun KBI sangat berperan dalam melakukan proses budidaya hingga prosesing benih. Jumlah tenaga pelaksana harus sesuai dengan beban kerja dan kapasitas produksi KBD. Disamping itu tenaga pelaksana KBD dapat juga difungsikan sebagai “kurir” yang melakukan jasa delivery benih ke anggota KRPL.

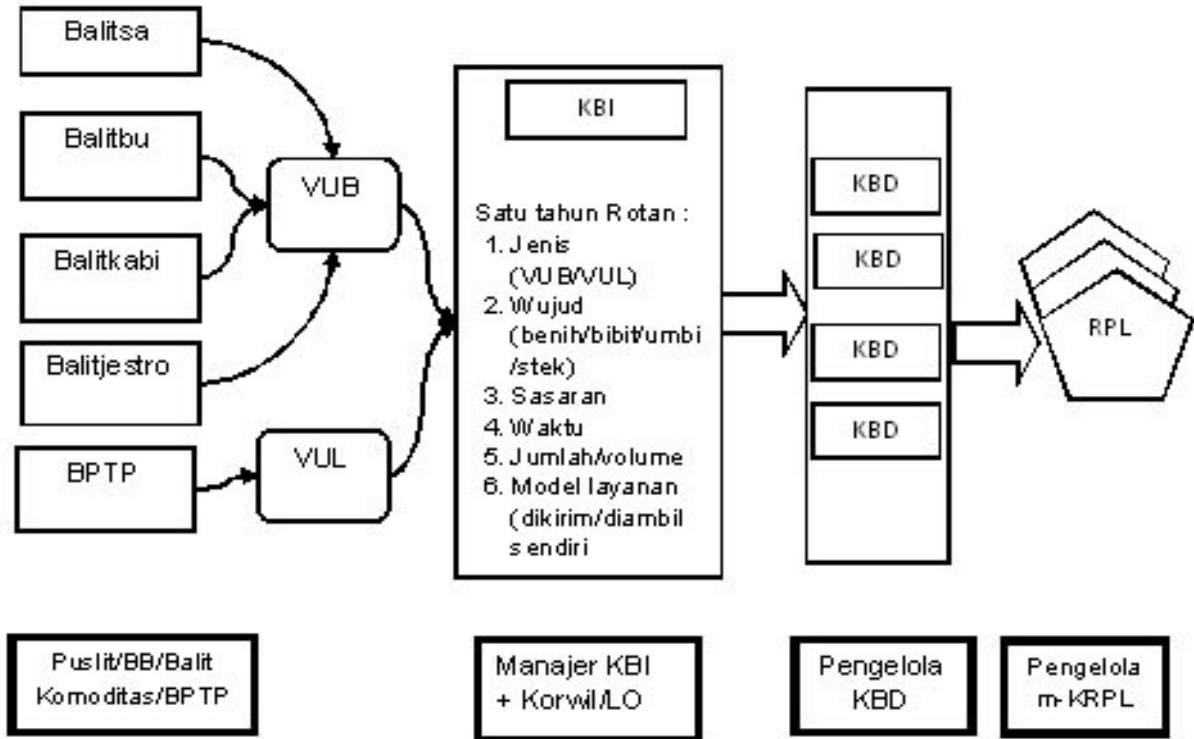
#### 4.2. Langkah Operasional

Benih yang akan diperbanyak di KBI adalah benih sumber dengan kualitas baik. Kualitas baik tercapai apabila dalam proses pembentukan sampai dengan proses delivery terjaga dengan baik. Benih sumber terdiri atas Varietas Unggul Baru (VUB) dan Varietas Unggul Lokal (VUL). VUB dihasilkan oleh Balitbangtan di Pusat Penelitian, Balai Besar, dan Balai Penelitian Komoditas. Sedangkan VUL dihasilkan oleh BPTP.

Proses yang dilalui dari mulai benih VUB dihasilkan sampai dengan upaya memperbanyak benih melibatkan beberapa tahapan seperti pada Gambar 3.

Tahapan dalam memproduksi dan memperbanyak benih seperti pada Gambar 3 adalah sebagai berikut :

1. Balai komoditas menghasilkan benih/bibit tanaman dalam kelas FS/SS. Benih atau bibit tersedia di UPBS masing-masing Balai komoditas.
2. **Delivery benih sumber dari Balai Komoditas ke KBI.** Pengiriman benih sumber dari Balit Komoditas ke KBI merupakan titik kritis dalam sistem delivery benih. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah :
  - a. **Waktu pengiriman benih.** Jangka waktu pemesanan sebaiknya satu musim tanam sebelumnya terutama untuk tanaman semusim seperti tanaman sayuran. Proyeksi kebutuhan benih untuk satu tahun disampaikan pada setiap akhir tahun agar dapat direncanakan proses produksinya oleh Balai Komoditas.



**b. Perlakuan benih.** Perlakuan benih setelah sampai di lokasi

harus sesuai dengan SOP untuk mencegah deteriorasi. Oleh sebab itu, SDM yang menangani teknis operasional sebaiknya sudah berpengalaman dan pernah mengikuti pelatihan perbanyak benih.

c. **Kesiapan lahan.** Sebaiknya lahan yang akan digunakan untuk perbanyak benih sudah dipersiapkan untuk menghindari keterlambatan penanaman dan kerusakan karena penyimpanan.

3. **Perbanyak benih sumber di KBI.** Benih sumber diperbanyak di KBI dalam bangunan yang permanen yang berlokasi di masing-masing BPTP. Manajer KBI berperan aktif dalam merencanakan, membuat proyeksi kebutuhan benih dan menghubungi masing-masing UPBS Balit Komoditas untuk sinkronisasi ketersediaan benih dimaksud. Titik kritis dalam tahap ini adalah skill (keterampilan) SDM pelaksana. Syarat keharusan bagi SDM pelaksana adalah memahami teknis operasional dan SOP dari perbanyak benih agar mutu benih tetap terjamin.

**Yang perlu diperhatikan bagi pengelola KBI adalah :**

a. Ketersediaan lahan yang sesuai prasyarat perbanyak benih/bibit.  
b. Tempat/ruang prosesing benih/bibit. Digunakan untuk penjemuran, *screening* benih, pengemasan dan penyimpanan.  
c. Kemasan benih. Kemasan benih penting untuk mencegah kerusakan dan memuat informasi tentang tanggal produksi dan perkiraan kadaluarsa serta informasi profil benih.

4. **Delivery dari KBI ke KBD.** Peran KBI utamanya adalah mensuplai benih ke KBD. Agar sistem delivery tidak macet atau terputus, pendamping (*Liason Officer*) masing-masing kabupaten menjembatani antara kebutuhan KBD dengan ketersediaan benih di KBI.

5. **Delivery dari KBD ke RPL.** Distribusi dari KBD ke RPL dapat dilakukan dengan cara mengantarkan pesanan benih ke RPL sesuai dengan pesanan, atau bisa juga dengan cara membuka

pelayanan jual-beli di KBD. Tidak menutup kemungkinan sistem delivery benih dari KBD ke RPL melalui gotong royong semua yang terlibat dalam KRPL.

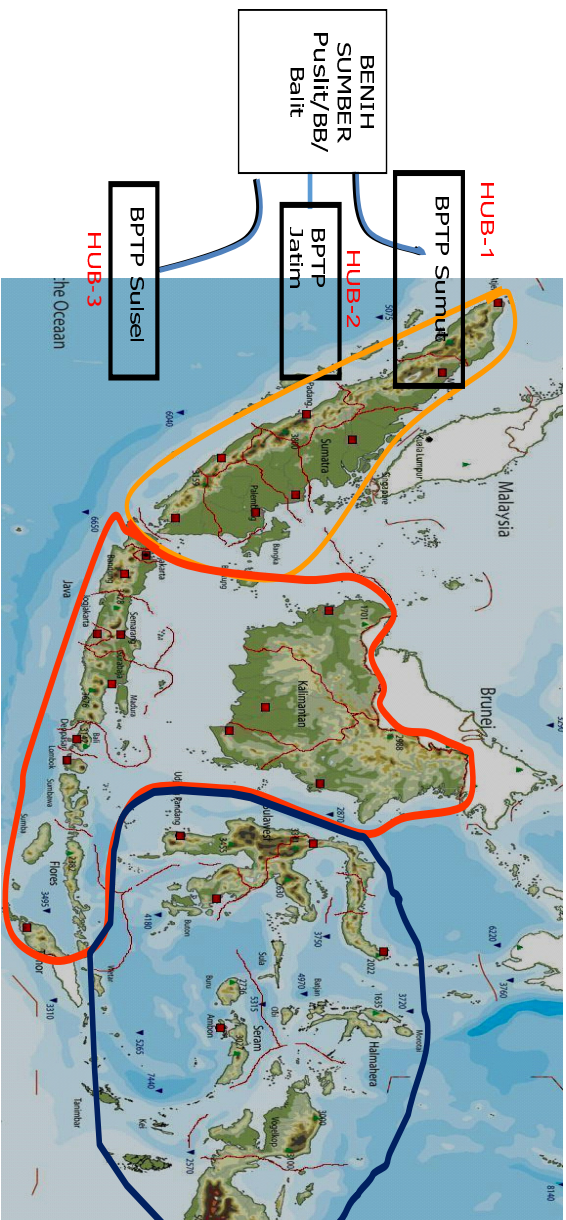
Yang perlu diperhatikan dalam delivery benih dari KBD ke RPL adalah :

- a. Pembibitan dilakukan secara berkala sehingga tersedia bibit dalam stadia umur yang berbeda untuk mengantisipasi permintaan.
- b. Komoditas benih/bibit tersedia dalam aneka jenis secara kontinu
- c. Sebaiknya KBD juga menyediakan media tanam (campuran tanah, pupuk kandang dan arang sekam) untuk memudahkan RPL dalam melakukan pergantian media jika diperlukan. Sehingga tidak ada jeda waktu menunggu pergantian media yang dapat menurunkan semangat untuk menanam kembali.

Untuk mempersingkat jalur permintaan benih dan memperpendek jarak pengiriman, upaya massalisasi benih sumber di tingkat KBI BPTP direkomendasikan melalui konsep HUB (simpul) yang membagi rentang wilayah Indonesia menjadi 3 pusat (Gambar 4).

Konsep HUB merupakan upaya memudahkan dan mempercepat ketersediaan benih unggul Balitbangtan ke seluruh Wilayah Indonesia. Dasar pertimbangan adalah *corporate* manajemen, distribusi dan pemetaan Sumber Daya. Masing-masing HUB bertanggung jawab sebagai pusat perbanyakan benih yang bertanggung jawab untuk melayani kebutuhan wilayah sekitarnya. Terdapat tiga HUB, yaitu:

1. HUB-1 meliputi wilayah: Sumatera dan berpusat di Sumatera Utara,
2. HUB-2 meliputi wilayah: Pulau Jawa, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara berpusat di Jawa Timur.
3. HUB-3 meliputi wilayah: Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Papua berpusat di Sulawesi Selatan.



Gambar 4. Massalisasi Benih Unggul Balitbangtan

# V. RENCANA INTEGRASI PENGEMBANGAN TAMAN AGRO INOVASI DAN AGRO INOVASI MART BALITBANGTAN

---

## 5.1. Prinsip

Pengembangan Taman Agro Inovasi dan Agro Inovasi Mart Balitbangtan pada prinsipnya tidak mengembangkan atau membangun suatu hal yang baru, namun sebagai pengembangan dari program atau kegiatan yang telah ada dan telah dibangun oleh BPTP. Pengembangan Taman Agro Inovasi akan diintegrasikan dengan Agro Inovasi Mart Balitbangtan, serta diintegrasikan juga dengan program dan kegiatan yang ada di BPTP, termasuk KRPL beserta KBInya.

## 5.2. Fungsi

Pengembangan Taman Agro Inovasi dan Agro Inovasi Mart Balitbangtan mempunyai 4 fungsi, yaitu:

### 1. Display Inovasi Teknologi

Sebagai display inovasi teknologi, maka Taman Agro Inovasi diintegrasikan dengan Kebun Benih/Bibit Induk (KBI) dan Strata IV KRPL yang dibangun di lingkungan kantor BPTP. Pengembangan KBI dan Strata IV KRPL tersebut dikemas sebagai taman untuk pengembangan display inovasi teknologi, yaitu:

- Berbagai varietas (tanaman pangan dan palawija, hortikultura, biofarmaka, dan tanaman hias)
- Hemat lahan (inovasi berbagai model media/wadah tanam)
- Hemat air
- Pengendalian OPT secara nabati
- Pembuatan kompos

- Pasca panen dan pengolahan hasil
- Pertanian Bioindustri
- Dsb.

Yang perlu diperhatikan untuk pengembangan fungsi ini, antara lain:

- a. Komoditas yang dikembangkan harus memperhatikan/mendukung program diversifikasi pangan dan komoditas yang sedang trend
- b. Teknologi yang dikembangkan diharapkan dapat dijadikan celah agar para peneliti dapat melakukan kajian.
- c. Pengelolaan yang baik untuk menjaga keberlanjutannya

## **2. Konsultatif (sebagai Klinik Agribisnis)**

Untuk menjalankan fungsi ini, maka pengelolaan Taman Agro Inovasi dan Agro Inovasi Mart dapat diintegrasikan dengan kegiatan Diseminasi/Penyuluhan di BPTP. Sasaran pengembangan fungsi ini adalah: penyuluh atau petugas lapang, swasta yang akan mengembangkan inovasi, dan masyarakat umum.

Kegiatan ini sebaiknya dilaksanakan di suatu tempat/ruang (terbuka maupun tertutup) di sekitar display (taman) atau perpustakaan, dan dilengkapi dengan berbagai publikasi inovasi teknologi. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini juga harus dilengkapi jadwal kerja petugas yang ditunjuk dalam memberikan konsultasi pertanian/agribisnis.

## **3. Komersialisasi Produk (Teknologi Balitbangtan)**

Dalam menjalankan fungsi ini, maka pengembangan Taman Agro Inovasi dan Agro Inovasi Mart perlu berintegrasi dengan Koperasi dan UPBS BPTP. Untuk itu, perlu gerai khusus untuk menjual hasil produk Balitbangtan dan mitra, serta kelompok binaan, seperti: benih/bibit, pupuk organik/kompos, hasil panen, hasil olahan, dan sebagainya. Kerjasama dengan koperasi dan UPBS dengan sistem yang telah disepakati, dan mempertimbangkan adanya PNBK.



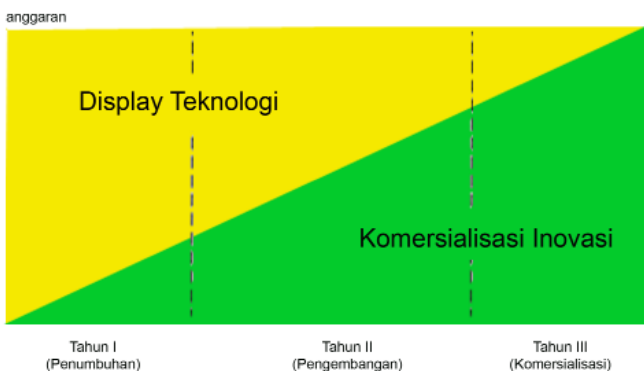
## 4 Kemitraan

Fungsi ini dapat diintegrasikan dengan kegiatan pengembangan Model Pembangunan Pertanian Perdesaan melalui Inovasi (MP3MI), atau pengembangan kegiatan lainnya bersama mitra. Dalam pengembangan fungsi ini, maka pengelola Agro Inovasi Mart harus memilih komoditas pangan spesifik lokasi yang dihasilkan Balitbangtan, dan prospektif untuk dikembangkan.

### 5.3. Roadmap Kegiatan

Idealnya, pengembangan Taman Agro Inovasi dan Agro Inovasi Mart Balitbangtan melalui tiga tahapan (3 tahun), seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5. Tahapan tersebut yaitu: Tahun I (Penumbuhan); Tahun II (Pengembangan); dan Tahun III (Komersialisasi). Setiap tahapan tersebut tentunya perlu porsi anggaran dan fungsi yang berbeda. Pada Tahap Penumbuhan, fungsi Display Teknologi mempunyai porsi yang besar. Tahap Pengembangan, seimbang antara fungsi Display Teknologi dan Komersialisasi Inovasi. Untuk selanjutnya, pada Tahap Komersialisasi, porsi anggaran akan berkurang dan peran mitra akan dominan.

Secara operasional, Pedoman Pengembangan Taman Agro Inovasi dan Agro Inovasi Mart Balitbangtan akan dibuat secara terpisah.



Gambar 5. Tahapan pengembangan integrasi KRPL, Taman Agro Inovasi dan Agro inovasi Mart



## VI. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

---

Sesuai peraturan lingkup Kementerian Pertanian, bahwa pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2010 tentang Sistem Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan. Diamanatkan didalamnya bahwa setiap K/L yang mendapat alokasi dana yang bersumber dari APBN wajib melakukan pemantauan dan evaluasi serta melaporkan hasilnya secara berjenjang.

### 6.1. Pemantauan (*Monitoring*) dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi merupakan suatu bagian integral dari siklus manajemen pembangunan untuk memantau, mengendalikan, menilai dan melaporkan program kegiatan yang telah direncanakan agar efektif dan efisien. Pada dasarnya antara pemantauan dan evaluasi hampir sama dan saling berkait, namun dilihat dari ciri *input*, waktu, dan fokusnya, maka pemantauan lebih memperhatikan *input dan output* kegiatan, periode pelaksanaan lebih panjang, dan target pemantauan lebih terfokus, sedangkan evaluasi lebih memperhatikan *outcome* kegiatan, periode pelaksanaan lebih panjang, dan target group lebih luas.

Namun, hakekatnya pemantauan dan evaluasi merupakan satu proses dalam kegiatan untuk menjaga konsistensi dan efektivitas pencapaian sasaran/target. Ruang lingkup yang dipantau dan dievaluasi meliputi: (1) kesesuaian rencana, tujuan dan tahapan kegiatan dengan implementasi di lapang, (2) kesesuaian (realisasi) penggunaan anggaran, dan (3) hasil dan manfaat implementasi KRPL.

Pelaksana pemantauan dan evaluasi adalah Tim Posko Penggerak dan Pengelola KRPL, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal yang dibutuhkan dalam melakukan pemantauan dan

evaluasi yang efektif adalah tersedianya data awal, indikator kinerja dan hasil, mekanisme atau prosedur pelaksanaan kegiatan. Mengingat pemantauan dan evaluasi merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting, maka kegiatan pemantauan dan evaluasi harus benar-benar direncanakan dengan baik. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan KRPL dilakukan dengan pendekatan indikator kinerja yang meliputi indikator input, proses, output, dan outcome. Secara umum, indikator dan parameter implementasi KRPL telah diuraikan dalam Sub Bab 1.3.

## **6.2. Pelaporan dan Sistem Informasi KRPL**

Pelaporan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting di dalam proses pembangunan. Pelaporan dilakukan untuk memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada pemangku kepentingan/pimpinan sebagai bahan pengambilan keputusan

Pelaporan pelaksanaan m-KRPL dan KRPL disusun oleh Penanggungjawab masing-masing lokasi, yang selanjutnya dilaporkan melalui proses satu pintu dari BPTP ke Sekretariat Posko Penggerak dan Pengelola KRPL (cq. BB Pengkajian). Selanjutnya, BB Pengkajian akan merangkum laporan dari seluruh BPTP untuk dilaporkan kepada Badan Litbang Pertanian dan Menteri Pertanian secara berkala.

Sistem informasi KRPL ditujukan untuk menjaga ketersediaan database yang lengkap dan akurat sebagai salah satu parameter bagi pencapaian tujuan akhir program KRPL. Sistem informasi ini dikemas dalam berbagai media yang telah mempublikasikan pengembangan KRPL sejak tahun 2011 hingga saat ini, meliputi video, publikasi populer, komik, foto-foto kegiatan dan petunjuk teknis pengembangan KRPL masing-masing provinsi. Sedangkan yang berupa data, didokumentasikan melalui database yang telah dibangun BB Pengkajian sejak tahun 2011. Database ini bersifat dinamis, karena mengakomodir perkembangan setiap tiga bulan yang dilaporkan oleh para penanggungjawab KRPL di BPTP.

Format laporan kegiatan KRPL beserta format isian data untuk melengkapi database terdapat pada Lampiran 2.

## VII. PENUTUP

---

Peran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) sangat penting dalam menyebarluaskan inovasi pertanian, utamanya inovasi yang telah dihasilkan Badan Litbang Pertanian.

Penyusunan petunjuk pelaksanaan ini memberikan arahan umum bagi pelaksana kegiatan KRPL di daerah (BPTP dan instansi terkait), dan diharapkan tidak mematikan kreativitas serta upaya improvisasi di tingkat lokal, sesuai dengan potensi dan sumberdaya yang ada. Hal ini menjadi penting, karena variasi kegiatan antar wilayah, akan memperkaya pemahaman terhadap upaya ini, sekaligus akan membuka peluang pengembangan spesifik lokasi dengan tingkat keberlanjutan yang lebih baik.

Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari ini juga diharapkan dapat dilengkapi dengan petunjuk teknis bagi pelaksana di lapangan. Penyusunan petunjuk teknis di lapangan diupayakan lebih banyak melibatkan *stakeholders* di daerah, dan upaya ini dapat saja menjadi bagian dari program lain yang sudah berjalan di masing-masing daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

---

- Anonim. 2002. Pedoman Umum Pemanfaatan Pekarangan. [http://kambing.ui.ac.id/bebas/v12/\\_\\_\\_\\_\\_artikel/pangan/DEPTAN/NewFolder/II/PedumPengembanganPekarangan.doc](http://kambing.ui.ac.id/bebas/v12/_____artikel/pangan/DEPTAN/NewFolder/II/PedumPengembanganPekarangan.doc).
- FAO. 1996. Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit Plan of Action. World Food Summit 13-17 November 1996. Rome.
- Badan Litbang Pertanian. 2011. Panduan Umum Model Kawasan Rumah Pangan Lestari. Jakarta.
- Badan Litbang Pertanian. 2011. Panduan Umum Model Spektrum Diseminasi Multi Chanel. Jakarta.
- Kementerian Pertanian. 2011. Panduan Kawasan Rumah Pangan Lestari. Jakarta.
- Putri, E. I. K. 2009. Ancaman dan Solusi atas Krisis Pangan, Energi, dan Air serta Peran Keilmuan Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan dalam Mengatasi Krisis Tersebut. Orange Book. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dalam Menghadapi Krisis Ekonomi Global. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. IPB Press.
- Rusastra, I. W., Supriyati, W. K. Sejati, dan Saptana. 2008. Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pedesaan: Analisis Program Ketahanan Pangan dan Desa Mandiri Pangan. Kerjasama PenelitianBadan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian dan Centre for Alleviation of Poverty through Secondary Crops' Development in Asia and the Pacific (UNESCAP CAPSA).

# LAMPIRAN

---

## Lampiran 1. Format Laporan KRPL

- **Ukuran kertas A4, Tahoma 11pt, margin kiri 4cm, kanan-atas-bawah 3cm, spasi 1,5cm**

### **Format Laporan:**

Halaman Judul  
Kata Pengantar  
Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar

#### **I. PENDAHULUAN**

- 1.3. Latar Belakang
- 1.4. Tujuan
- 1.5. Keluaran
- 1.6. Perkiraan Hasil (Outcome)
- 1.7. Manfaat (Benefit) dan Dampak (Impact)

#### **II. KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **III. METODOLOGI**

- 3.1. Pendekatan
- 3.1. Waktu dan Pemilihan Lokasi
- 3.1. Tahapan Kegiatan

#### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

- 4.1. Koordinasi dan Sosialisasi
- 4.2. Dukungan M-KRPL dalam Pengembangan Pertanian [Setempat: opsi Perkotaan atau Perdesaan]
- 4.3. Implementasi Pendampingan

### 4.3.1. Karakteristik Lokasi dan Kooperator

Tabel. 1

Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa

Tabel.2

Lokasi	Instansi Koperator yang terlimbat (RPL)	Karakteristik Sumberdaya	
		Alam	Manusia

### 4.3.2. Tahap Pelaksanaan

Tabel. 3

Lokasi	Tahapan Implementasi		
	Sosialisasi	Implementasi	Pendampingan

### 4.3.3. Peran Kelembagaan

- 4.4. Implementasi Penguatan KBI dan Sistem delivery Benih
- 4.5. Permasalahan/Kendala dan Rencana Tindak Lanjut
- 4.6. Pengembangan Jejaring Kerjasama antar M-KRPL/ KRPL dan *Stakeholders*
- 4.7. Pembelajaran dan Keberlanjutan KRPL

## V. KESIMPULAN DAN SARAN KEBIJAKAN

## VI. DAFTAR PUSTAKA



**Lampiran 2. Database KRPL (harap disampaikan dalam file excel)**

Provinsi	Kab/ Kota	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Tahun Awal	Juml. Unit		Jumlah KK (RPL)		Koordinat (Decimal Degree)		Penghematan Pengeluaran RT (Rp/Bulan/KK)		Pola Pangan Harapan (PPH)
					m-KRPL	KRPL (Replikasi) Non Sentral	Awal	Akhir	Bujur	Lintang	Selang (Range)	Rataan	

Lanjutan...

Bentuk Dukungan PEMDA			Kelembagaan Pemasaran		
Anggaran (Rp)	Natura	Keterangan	Jenis Produk	Jenis Pasar	Kisaran tambahan pendapatan keluarga (Rp/KK)

### Lampiran 3. Format Evaluasi Kegiatan Responsif Gender

#### I. DATA UMUM

1. Provinsi :
2. Tanggal Pengumpulan data :
3. Tanggal Penyampaian data :
4. Nama Koordinator dan Jenis Kelamin:
5. No HP dan alamat email :

#### II. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN RESPONSIF GENDER

**Tabel 1. Penganggaran dan Ouput Kegiatan Responsif Gender**

No.	Kegiatan	Anggaran			Output			Keterlibatan		Kendala/ Mas-alah	Tindakanj Penyelesaian yang diperlukan
		Pagu (Rp)	Realisasi		Uraian	Target	Realisasi	Perempuan	Laki-Laki		
			(Rp)	(%)							

Tabel 2. Tahapan Kegiatan KRPL serta Partisipasi Laki-Laki dan Perempuan

No.	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Partisipasi (%)		Masalah/Kendala	Dampak	Rencana Tindak Lanjut
			Laki-Laki	Perempuan			
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Sosialisasi Tingkat Provinsi Tingkat Kabupaten Tingkat Desa (Lokasi implementasi) Dsb.						
B.	Pembentukan dan dinamika kelompok sasaran Identifikasi awal Pertemuan rutin Dsb.						
C.	Pelatihan Budidaya Tanaman Pembuatan kompos Pembuatan pestisida nabati Budidaya ternak Budidaya ikan Dsb.						
D.	Pelaksanaan Pembangunan Kebun Bibit Desa (KBD) Penyiapan media tanam Penyemaian Pembubunan Penanaman langsung Pemeliharaan Panen Pengolahan hasil Pemasaran						

No.	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Partisipasi (%)		Masalah/ Kendala	Dampak	Rencana Tindak Lanjut
			Laki-Laki	Perempuan			
E.	Pendampingan 1. Pengelolaan KBD 2. Implementasi tingkat rumahtangga (RPL) 3. Dsb.						
F.	Monitoring 1. Tingkat Provinsi 2. Tingkat Kabupaten 3. Tingkat Desa (Lokasi implementasi) 4. Dsb.						
G.	Evaluasi						

Lampiran 4. Contoh Kuesioner Kajian Aspek Ekonomi, Sosial dan Kelembagaan KRPL

**PANDUAN WAWANCARA TINGKAT RUMAHTANGGA**

**PERCEPATAN DAN PERLUASAN MODEL KAWASAN  
RUMAH PANGAN LESTARI MENDUKUNG  
KETAHANAN PANGAN KELUARGA**

Nama Responden : -----  
Desa : -----  
Kecamatan : -----  
Kabupaten : -----  
Propinsi : -----

Pewawancara : -----  
Tgl. Wawancara : -----  
Kategori Strata : -----

BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN

2015

## A. Karakteristik Responden

1. Umur : ..... th
2. Pekerjaan utama: 1. Petani; 2. PNS; 3. Swasta; 4. Ibu Rumahtangga; 5. Lainnya.....
3. Pendidikan : ..... th
4. Jumlah anggota keluarga: ..... orang
5. Jumlah anggota keluarga yang membantu merawat RPL : ..... orang
6. Luas total lahan pertanian yang digarap: ..... ha
7. Luas lahan pekarangan : ..... m<sup>2</sup>

## B. Keikutsertaan dalam pengembangan RPL

1. Sejak kapan menerapkan RPL: Bulan ....Tahun .....
2. Luas pekarangan yang digarap, jenis komoditas yang diusahakan dan bagaimana pola penataannya?

No.	Uraian	Jawaban	Alasan
1.	Luas lahan pekarangan yang digarap (m <sup>2</sup> )		
2.	Jenis tanaman yang diusahakan		
3.	Bagaimana pola penataan		
4.	Prioritas komoditas yang diusahakan		

### C. Informasi dan alasan mengembangkan RPL

1. Dari mana dapat informasi pertama tentang RPL?
  - a. Melihat langsung
  - b. Tetangga
  - c. PPL
  - d. Pejabat, sebutkan.....
  - e. Lainnya .....  
.....
  
2. Kenapa tertarik mengembangkan RPL
  - a. Hobby
  - b. Ikut-ikutan
  - c. Lainnya.....
  
3. Apa tujuan utama mengembangkan RPL, urutkan berdasarkan prioritas: ....; ....; ....; ....;
  - a. Meningkatkan ketersediaan pangan keluarga
  - b. Mengurangi biaya untuk membeli kebutuhan pangan
  - c. Menambah pendapatan keluarga
  - d. Lainnya, sebutkan .....
  
4. Apakah pengembangan RPL ini juga membantu mengurangi pengangguran?
  - a. Ya, alasannya: .....
  - b. Tidak, alasannya: .....



#### D. Penggunaan Input (satu kali siklus tanam)

Jenis Input	Jumlah	Harga/ satuan	Nilai	Keterangan
Benih/Bibit				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
Pupuk:				
1.				
2.				
3.				
Obatan-obatan				
1.				
2.				
3.				
Tenaga Kerja/ HOK per kegiatan		(Upah per HOK)		(HOK= jumlah orang x jam x hari)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Jenis Input	Jumlah	Harga/ satuan	Nilai	Keterangan
Biaya Lainnya (polibag, bambu, paralon, sekop, media tanam, dsb)				Tulis berapa umur pakainya
1.				
2.				
3.				
4.				

### E. Hasil (Output)

Jenis Tanaman	Berapa kali panen dalam sebulan	Jumlah sekali panen	Harga per satuan	Nilai
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

### F. Hasil yang di Jual dan di Konsumsi

Jenis Tanaman	Jual		Konsumsi	
	Jumlah	%	Jumlah	%
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

G. Struktur Pengeluaran Rumah Tangga Responden dalam Seminggu/sebulan terakhir, khusus untuk pangan (dalam nilai Rp)

Jenis Pengeluaran	Jumlah Per hari	Jumlah Perminggu	Jumlah Perbulan
1. Beras			
2. Indomie			
3. Ikan			
4. Daging			
5. Telur			
6. Tempe			
7. Tahu			
8. Ayam			
9. Sayur-sayuran			
10. Cabe			
11. Bumbu lainnya			
12. Buah-buahan			
13. Minyak Goreng			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

H. Pengeluaran untuk komoditas yang ditanam di RPL (sebelum dan sesudah RPL) dalam Rupiah

Jenis Pengeluaran	Jumlah Per hari		Jumlah Perminggu		Jumlah Perbulan	
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah

I. Masalah/kendala apa yang dirasakan dalam penerapan KRPL ini? dan bagaimana sebaiknya hal tersebut dapat diatasi?

.....

.....

.....

J. Agar KRPL ini tetap berlanjut (lestari), menurut ibu/bapak aspek apa saja yang perlu diperbaiki, dan oleh siapa?

.....

.....

.....

**PANDUAN WAWANCARA TINGKAT PENGELOLA KRPL  
(FGD)**

**PERCEPATAN DAN PERLUASAN MODEL KAWASAN  
RUMAH PANGAN LESTARI Mendukung  
KETAHANAN PANGAN KELUARGA**

Desa : -----  
Kecamatan : -----  
Kabupaten : -----  
Provinsi : -----

Pewawancara : -----  
Tgl. Wawancara: -----

BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2015

## Karakteristik Lokasi

1. Sejak kapan melaksanakan KRPL (bulan dan tahun) :
2. Apakah pernah melaksanakan kegiatan sejenis, sebelum ada KRPL? Ya/Tidak

Bagaimana bentuk kegiatannya, dan siapa saja yang terlibat:

.....  
 .....  
 .....

3. Bagaimana perkembangan jumlah KK (RPL) dan komoditas yang diusahakan?

No.	Uraian	Strata Luas Pekarangan					
		I		II		III	
		Jumlah	Komoditas	Jumlah	Komoditas	Jumlah	Komoditas
1.	RPL awal						
2.	RPL 3 bulan kemudian (Bulan .....)						
3.	RPL saat ini						
4.	Perkembangan (RPL) di luar desa						

## A. Jejaring Kerjasama Antar M-KRPL dan KRPL

(Aspek: Teknologi/Benih/Saprotan/Pengolahan Hasil/Pemasaran/  
Lainnya.....)

No.	Aspek Kerjasama	Bentuk kerjasama	Mulai Kapan	Siapa saja yang terlibat	Keterangan
1.	M-KRPL Vs M-KRPL				
2.	M-KRPL Vs. KRPL				
3.	KBD Vs KBD				
4.	KBI Vs KBD				
6.	Lainnya, .....				

## B. Penelurusan Kelembagaan di tingkat Kawasan

### 1. Kelembagaan Input Produksi

Isikan disini:

1. Bagaimana mendapatkan benih sayuran yang ditanam? KBD/benih sendiri/beli/lainnya
2. Jika membeli, berapa harga beli untuk masing-masing jenis benih yang ditanam? Ditabelkan per jenis komoditas
3. Jika benih sendiri, bagaimana menjaga kontinuitas ketersediaan benih setiap kali hendak menanam? Punya stok banyak/dibantu oleh benih KBD/minta ke tetangga/lainnya
4. Jika benih dari KBD, bagaimana partisipasi responden dalam menjaga kontinyuitas ketersediaan benih KBD?.....)
5. Bagaimana persepsi responden terhadap benih yang ditanam? Apakah ada perbedaan kualitas antara benih dari KBD, benih sendiri dan benih beli? (..... )  
..... )



6. Isikan tabel di bawah ini untuk input lainnya:

Pupuk	Kontinuitas	Kualitas
Pupuk kimia		
Pupuk kandang		
Obat-obatan		

7. Apa saja kendala dalam pengadaan benih, pupuk dan sarana input lainnya? (..... )

8. Apa saran responden untuk perbaikan kinerja kelembagaan input produksi? (.....)

## 2. Kelembagaan Produksi

Isikan disini:

1. Sumber dan cara mendapatkan teknologi
  
2. Apakah responden telah menerapkan teknologi sesuai prinsip RPL? Ya/tidak, Jika tidak, kenapa? .....  
.....  
.....  
.....
  
3. Apakah responden merasa kesulitan dalam mendapatkan teknologi penanaman pada kegiatan RPL? Ya/tidak, Jika ya, kenapa? .....  
.....  
.....  
.....
  
4. Apa saran responden demi perbaikan kinerja kelembagaan produksi ke depan?

### 3. Kelembagaan Pemasaran

Isikan disini:

1. Siapa penentu harga jual sayuran hasil panen pekarangan RPL? Responden/pegepul/gabungan/lainnya
2. Bagaimana proses penjualan sayuran hasil panen yang selama ini dilakukan? Dijual langsung ke konsumen/ke pedagang soto-baso-dll/ke pedagang pengepul/lainnya
3. Bagaimana system penjualannya? Individu/kolektif atau kawasan
4. Bagaimana system pembayarannya? Cash/kredit (... ..Hari)
5. Apa saja kendala dalam memasarkan hasil panen? .....  
.....  
.....  
.....
6. Apa saran responden demi perbaikan kelembagaan pemasaran? .....  
.....  
.....  
.....

#### 4. Kelembagaan Pendukung

- Peran tokoh masyarakat
- Peran ketua kelompok tani
- Peran pemda setempat
- Peranan lembaga keuangan

Isikan disini: